

EFEKTIVITAS PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP KINERJA KEMENTERIAN LEMBAGA

Ricky Dhamara^a, Achmad Fauzi^b

^aFakultas Ekonomi, rickybouzu@gmail.com, Universitas Terbuka

^bFakultas Ekonomi, achmad.fauzi@dsn.ubharajaya.ac.id, Universitas Terbuka

ABSTRACT

Budgeting is an important tool used by the government to allocate resources efficiently and effectively to achieve national development goals. The purpose of this research is to determine the effectiveness of using performance-based budgeting to improve the performance of ministries and agencies in Indonesia. Performance-based budgeting is an approach that emphasizes the achievement of desired results and impacts, as well as the objective measurement of performance. In this approach, performance is measured by looking at the attainment of targets and performance indicators. Performance-based budgeting allows ministries and agencies to manage resources more efficiently by providing a clear and measurable framework. It also enhances transparency and accountability in public financial management. The presence of an objective performance measurement system can assist ministries and agencies in tracking and accurately justifying the use of budgets. This can enhance public trust and reduce the likelihood of corruption in the management of state finances. This study provides useful information for decision-makers at the ministry and agency levels on how to implement performance-based budgeting to improve performance. Policy recommendations are also provided, such as enhancing personnel understanding and skills, improving supervision and evaluation, and appropriately structuring budgets to support implementation. As a result, this research enhances our understanding of how to apply performance-based budgeting to the performance of ministries and agencies. It highlights the crucial role of ministries and agencies in efficiently and effectively managing public expenditure budgets to achieve national development goals.

Keywords: Budget allocation, performance-based budgeting, performance.

ABSTRAK

Anggaran belanja adalah alat penting yang digunakan oleh pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya demi mencapai tujuan pembangunan nasional secara efisien dan efektif. Tujuan dari studi ini untuk mengetahui seberapa efektif menggunakan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) untuk meningkatkan kinerja kementerian dan lembaga di Indonesia ABK adalah pendekatan yang menekankan pada capaian hasil dan dampak yang diinginkan serta pengukuran kinerja secara objektif. Dalam pendekatan ini, kinerja diukur dengan melihat pencapaian target dan indikator kinerja. ABK memungkinkan kementerian dan lembaga untuk mengelola sumber daya dengan lebih efisien dengan memberikan kerangka kerja yang jelas dan dapat diukur. ABK juga menambah transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan keuangan publik. Adanya sistem pengukuran kinerja yang objektif dapat membantu kementerian dan lembaga melacak dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara lebih akurat. Ini dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mengurangi kemungkinan korupsi dalam pengelolaan keuangan negara. Studi ini memberikan informasi yang berguna bagi pengambil keputusan di tingkat kementerian dan lembaga tentang bagaimana menerapkan ABK dapat meningkatkan kinerja. Rekomendasi kebijakan juga diberikan, seperti meningkatkan pemahaman dan keterampilan personel, meningkatkan pengawasan dan evaluasi, dan mengatur anggaran dengan cara yang tepat untuk mendukung pelaksanaannya. Akibatnya, penelitian ini meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana menerapkan ABK terhadap kinerja Kementerian dan Lembaga. Penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya peran Kementerian dan Lembaga dalam mengelola anggaran belanja publik secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Kata Kunci: Anggaran belanja, Anggaran Berbasis Kinerja, kinerja

1. PENDAHULUAN

Kinerja sangat penting bagi semua organisasi, termasuk lembaga pemerintahan. Efektivitas ABK sangat penting untuk mencapai kinerja optimal. Penggunaan anggaran yang tepat dan terarah dapat mempengaruhi kinerja kementerian lembaga secara signifikan, sedangkan ketidakseimbangan antara alokasi anggaran dan pencapaian kinerja dapat menghambat pertumbuhan dan kemajuan organisasi.

Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi seberapa efektif penerapan ABK terhadap kinerja kementerian lembaga. Dengan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana penerapan ABK berhubungan dengan kinerja organisasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi manajer dan pengambil keputusan di kementerian lembaga tentang cara mengoptimalkan penggunaan anggaran. Dengan memahami hubungan antara penerapan ABK dan kinerja kementerian lembaga, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan teori dan praktik manajemen pada Kementerian dan Lembaga.

Pada penelitian ini dapat ditarik masalah pokok, apakah menggunakan ABK pada Kementerian dan Lembaga dapat meningkatkan efektivitas kinerja Kementerian dan lembaga

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Anggaran

Farnitawati (2016) berpendapat bahwa anggaran pada dasarnya adalah sebuah rencana yang dibuat dalam bentuk kuantitatif untuk jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Anggaran membantu Anda mengetahui apa yang akan dilakukan oleh manajemen, apa yang menjadi prioritas mereka, tujuan, dan cara memenuhi tujuan tersebut. Tahap aktivitas yang disebut penganggaran sangat penting dalam siklus perencanaan dan pengendalian.

Anggaran adalah panduan untuk rencana kegiatan yang akan dilakukan pemerintah. Ini mencakup transfer, pembiayaan, belanja dan pendapatan serta rencana, pembiayaan, dan belanja yang diukur dalam mata uang rupiah dan disusun secara sistematis dalam jangka waktu tertentu. Anggaran pemerintah adalah dokumen formal yang merupakan hasil persetujuan antara legislatif dan eksekutif mengenai pendapatan dan pengeluaran yang diharapkan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan atau pengeluaran. Selama periode anggaran, yaitu periode tahunan, anggaran mengatur kegiatan belanja dan memberi dasar untuk perolehan pendapatan dan pembiayaan. Menurut Mardiasmo (2018) anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang ingin dicapai pada suatu periode tertentu dan dikemukakan dalam standar finansial, sedangkan penganggaran adalah cara untuk mempersiapkan anggaran.

2.2. Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pengertian ABK adalah:

- a. Sistem anggaran yang mengutamakan capaian hasil kinerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang sudah ditetapkan sebelumnya;
- b. tujuan dan sasaran kinerja menjadi dasar utama;
- c. pelaksanaan value for money dan efektivitas anggaran berdasarkan penilaian kinerja ; dan
- d. Anggaran kinerja adalah sistem yang berisi kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai alat untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Taufiqurrahman (2014) berpendapat Sistem ABK sebagai alternatif sistem Line-Item Budgeting. Sistem Line-Item Budgeting terutama berfokus pada input, dengan peningkatan jumlah anggaran dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini kurang menekankan pada capaian output dan kurang mempertimbangkan kebijakan dan prioritas daerah. Prinsip ABK adalah anggaran yang menghubungkan pengeluaran Negara (Pengeluaran Negara) dengan hasil yang diinginkan (Output dan Outcome) sehingga setiap detail anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan untuk kemanfaatannya.

Fadhil (2019) berpendapat bahwa ABK merupakan metode penganggaran yang digunakan oleh manajemen untuk menghubungkan setiap biaya yang dimasukkan ke dalam program-program dengan manfaat yang didapatkan. Manfaat yang dihasilkan itu kemudian dimasukkan ke dalam target kinerja pada setiap unit. Untuk bagaimana suatu tujuan itu dicapai, dimasukkan ke dalam program yang diikuti dengan pendanaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan. Program pada ABK didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilakukan oleh suatu instansi Kementerian dan Lembaga agar mencapai tujuan dan sasaran serta mendapatkan alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

2.3. Kinerja Kementerian dan Lembaga

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga, Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam DIPA atau dokumen anggaran.

Kinerja adalah gambaran tentang pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan dalam mewujudkan tujuan, sasaran, serta visi dan misi organisasi (Bastian, 2006). Sedangkan menurut Kane dan Johnson (1995) pada Nila Mutia (2009), berpendapat bahwa kinerja sebagai outcome hasil kerja suatu organisasi untuk mewujudkan tujuan organisasi, kepuasan pelanggan dan kontribusinya pada peningkatan ekonomi masyarakat.

2.4. Penelitian Relevan Terdahulu

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang metode penelitian kualitatif berbasis dokumen, dengan fokus pada efektivitas pengaplikasian ABK pada Kementerian dan Lembaga. Ada beberapa kelebihan dalam metode penelitian dokumen dalam penelitian kualitatif di antaranya sebagai berikut:

- a. Akses ke data historis
- b. Penelitian yang hemat waktu dan biaya
- c. Data yang objektif:
- d. Analisis yang mendalam
- e. Mendukung triangulasi

Tabel 1. Penelitian relevan terdahulu

No.	Penulis/Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan Studi/Penelitian	Perbedaan Studi/Penelitian
1.	Dwi Suharnoko (2019)	Penerapan ABK terhadap Kinerja di Kabupaten Malang secara <i>general</i>	Sama-sama membahas Penerapan ABK terhadap Kinerja	Objek Penelitian berbeda
2.	M. Fadhil Junery, & Norhanisah (2019)	Pengaruh ABK terhadap peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah	Sama-sama membahas Penerapan ABK	Objek Penelitian berbeda
3.	U'ah Ganda Fratiwi (2017)	ABK pada Dinas Sosial Kalimantan Timur	Sama-sama membahas Penerapan ABK	Objek Penelitian berbeda
4.	Anwar Made & Retno Wulandari (2019)	Analisis Pengaruh Penerapan ABK, Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Malang	Sama-sama membahas Penerapan ABK	Objek Penelitian berbeda
5.	Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi & I Gd Nandra Hary Wiguna (2019)	Penerapan ABK merupakan usaha yang dilaksanakan pemerintah daerah untuk menjawab masalah alokasi keuangan daerah	Sama-sama membahas Penerapan ABK	Objek Penelitian berbeda
6.	Hafiez Sofyani (2018)	Semakin baik pelaksanaan ABK maka realisasi anggaran akan berjalan baik juga.	Sama-sama membahas Penerapan ABK	Objek Penelitian berbeda
7.	Dendy Syaiful Akbar (2018)	Pengaplikasian ABK pada BPJ Wilayah Pelayanan V	Sama-sama membahas Penerapan ABK	Objek Penelitian berbeda
8.	Fajri Akbar Fauzan (2021)	Mengetahui tentang pengaruh dari empat variable independen yang diteliti antara lain pemahaman, pelatihan, tekanan eksternal, dan juga komitmen organisasi terhadap variable dependen yaitu	Sama-sama membahas Penerapan ABK	Objek Penelitian berbeda

		efektifitas mplementasi ABK dan penyerapan anggaran.		
9.	Enita Binawati (2015)	Pengaruh faktor orientasi tujuan, informasi dan sumber daya dalam pelaksanaan ABK,	Sama-sama membahas Penerapan ABK	Objek Penelitian berbeda
10.	Ali Tafriji Biswan & Iklima Devi Grafitanti (2021)	Analisis pelaksanaan ABK di KPKNL Palangkaraya yang dilaksanakan dengan memperhatikan proses pelaksanaan berbasis kinerja serta hubungan aspek efisiensi. Akuntabilitas dan penyerapan, serta sudut pandang Activity-based Costing	Sama-sama membahas Penerapan ABK	Objek Penelitian berbeda

3. METODOLOGI PENELITIAN

Rumusan masalah, penelitian pada sebelumnya yang relevan, serta pembahasannya membentuk rangka kerja konseptual penelitian ini.



Gambar 1. Conseptual Framework

Perumusan masalah disusun dengan merumuskan permasalahan yang terjadi atas isu yang muncul pada pelaksanaan ABK. Kemudian studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis dokumen. Penelitian kualitatif berbasis dokumen ini dilakukan dengan melakukan analisis terhadap 10 (sepuluh) jurnal yang memiliki kesamaan studi. Analisis yang dilakukan mencakup proses penyusunan ABK antara lain sebagai berikut ini:

1. Penyusunan Program dan kegiatan
2. Perencanaan dan Penganggaran
3. Pelaksanaan dan Implementasi
4. Pelaporan
5. Monitoring dan Evaluasi

Kemudian mengolah data pada jurnal-jurnal tersebut untuk kemudian disusun kesimpulan atas jurnal yang telah dianalisa dan saran bagi perbaikan pelaksanaan ABK.

4. HASIL PENELITIAN

Semakin baik pelaksanaan ABK maka realisasi anggaran akan semakin baik juga. Hal ini disebabkan pada proses penyusunan anggaran yang secara sistem direncanakan dengan berorientasi pada kinerja, tingkat penyerapan anggaran akan terjadwal, sehingga mempermudah pemerintah untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan melaporkan perkembangan kegiatan yang dilaksanakan (Suharnoko, 2019:12). Hasil penelitian tersebut membuktikan dengan proses penyusunan perencanaan anggaran yang baik, artinya kegiatan yang direncanakan sebelumnya merupakan kegiatan yang diperlukan dan efektif dalam pelaksanaannya sehingga penyerapan anggaran terserap secara terjadwal dan mempermudah dalam evaluasi serta pelaporannya.

Junery & Norhanisah (2019:8) juga mengemukakan bahwa ABK berpengaruh positif pada kenaikan kinerja aparatur pemerintah daerah. Artinya, semakin baik ABK, maka semakin tinggi peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah. Namun, ABK berpengaruh sangat rendah terhadap kenaikan kinerja aparatur pemerintah daerah yaitu dengan persentase yang didapatkan sekitar 16,6%. Sedangkan sisanya sebesar 83,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diuji pada penelitian ini. Penelitian ini membuktikan bahwa ABK memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja aparatur pemerintah daerah, meski pengaruhnya hanya 16,6% dibandingkan variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian tersebut.

Berbeda dengan penelitian Fratiwi (2017:10) terkait Pengaruh ABK Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian, ABK memiliki hubungan positif yang kuat dan searah, artinya jika ABK dilaksanakan dengan baik maka peningkatan kinerja juga akan meningkat tajam. Begitu juga dengan sebaliknya, apabila pelaksanaan ABK tidak dilaksanakan dengan baik maka peningkatan kinerja pun juga akan sedikit berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah. Besarnya pengaruh ABK terhadap peningkatan kinerja aparatur pemerintah sekitar 56,7% dan sisanya sekitar 43,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diuji pada penelitian ini. Walaupun antar satu penelitian dengan penelitian lainnya memiliki perbedaan yang cukup signifikan, namun memiliki persamaan di mana penelitian-penelitian tersebut sama-sama membuktikan bahwa ABK memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja aparatur pemerintah.

Berdasarkan penelitian Made & Wulandari (2019:9), dengan menggunakan analisis regresi linear berganda membuktikan bahwa variabel pelaksanaan ABK (variabel independen) mempunyai pengaruh positif dan cukup signifikan terhadap kinerja keuangan daerah (variabel dependen). Penerapan ABK juga disusun oleh indikator input, output, outcome, benefit dan impact. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan ABK dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian Anwar Made & Retno Wulandari (2019) sejalan dengan hasil kesimpulan peneliti-peneliti lain yang menguji efektivitas ABK terhadap Kinerja aparatur pemerintah.

Dewi & Wiguna (2019:19) menyimpulkan bahwa Dengan menerapkan ABK, dapat meningkatkan kinerja keuangan, terutama dalam mewujudkan keekonomisan, keefektifan, dan kemandirian daerah dalam mengelola rumah tangga mereka sendiri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan ABK bersifat dinamis dan mampu memberikan perubahan peningkatan kinerja keuangan di pemerintah provinsi Indonesia baik sebelum maupun sesudah penerapan ABK. Ini ditunjukkan oleh rasio kinerja ekonomis, rasio kinerja efektivitas, dan rasio kinerja kemandirian daerah.

Sofyani (2018:9) menyimpulkan di dalam penelitiannya bahwa tingkat penyerapan anggaran akan meningkat seiring dengan tingkat implementasi ABK. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa, selama proses penyusunan anggaran yang direncanakan dengan berfokus pada kinerja, anggaran diserap dengan baik sehingga

memungkinkan pemerintah daerah untuk mengevaluasi dan memantau serta melaporkan informasi tentang kemajuan program yang sedang diimplementasikan. Penelitian ini juga menemukan bahwa kinerja di pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak dipengaruhi oleh seberapa efektif atau tidaknya pelaksanaan ABK yang sedang berlangsung.

Akbar (2018:9) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa ABK di BPJ Wilayah Pelayanan V telah dilaksanakan dengan baik karena mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan ABK berfungsi dalam peningkatan akuntabilitas serta kinerja BPJ Wilayah Pelayanan V. Penelitian ini mendukung pernyataan bahwa ABK yang baik serta penerapan yang efektif memiliki dampak positif terhadap Kinerja aparatur pemerintah

Berdasarkan penelitian Fauzan (2021:15), efektifitas pada implementasi ABK dan penyerapan anggaran dipengaruhi dari empat variabel independen yang diteliti antara lain pemahaman, pelatihan, tekanan eksternal, dan juga komitmen organisasi terhadap variabel dependen. Pemahaman memiliki efek positif dan signifikan terhadap efektifitas implementasi ABK. Pelatihan memiliki pengaruh yang positif dan memiliki nilai yang signifikan terhadap berlakunya efektifitas implementasi ABK. Tekanan eksternal memiliki pengaruh yang negatif nilai yang tidak signifikan terhadap efektifitas implementasi ABK. Komitmen organisasi memiliki pengaruh negative dan nilai yang tidak signifikan pada penyerapan anggaran. Meskipun 2 dari 4 variabel memiliki pengaruh negatif terhadap ABK, namun 2 variabel tersebut memiliki besaran tidak signifikan dibandingkan dengan 2 variabel positif dan signifikan.

Enita Binawati (2015:16) memberikan bukti empiris bahwa faktor-faktor seperti informasi, orientasi tujuan serta sumber daya berpengaruh pada pelaksanaan ABK. Pelaksanaan ABK juga mempengaruhi akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan, serta akuntabilitas keuangan. Khususnya pada akuntabilitas kinerja, yang didalamnya terdapat fenomena *insitutional isomorfisme*. Fenomena *insitutional isomorfisme* ini dapat digunakan untuk mengevaluasi tingkat keefektifan pelaksanaan ABK dan akuntabilitas sektor publik, guna meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah.

Biswan & Grafitanti (2021:18) menyimpulkan berdasarkan analisis penelitian, berpendapat bahwa ABK memberikan dampak positif pada pelaksanaan anggaran KPKNL Palangkaraya. Pernyataan ini masih konsisten dengan peneliti-peneliti lainnya yang menyimpulkan bahwa Analisis Berbasis Kinerja memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja aparatur pemerintah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Menurut sepuluh jurnal yang telah dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan ABK meningkatkan penyerapan anggaran dan kinerja aparatur pemerintah. Anggaran yang berorientasi pada kinerja menjadwalkan penyerapan, yang memudahkan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program yang dilaksanakan. Meskipun temuan penelitian bervariasi, namun dapat ditarik kesimpulan bahwa ABK memiliki dampak positif terhadap kinerja aparatur pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menerapkan ABK dapat meningkatkan kinerja keuangan, kinerja aparatur pemerintah, keefektifan, dan kemandirian dalam pengelolaan keuangan.

Terdapat faktor-faktor seperti tekanan eksternal, pelatihan, pemahaman, dan komitmen organisasi yang mempengaruhi efektivitas penerapan ABK dan penyerapan anggaran. Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja pemerintah, penting untuk menerapkan ABK dengan baik dan memperhatikan faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya.

5.2. Saran

Berdasarkan Analisa terhadap 10 (sepuluh) Jurnal mengenai efektivitas penerapan ABK terhadap kinerja Kementerian/Lembaga, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan, antara lain sebagai berikut:

1. Pada penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan untuk menambah instrumen penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data. Peneliti dapat mempertimbangkan penggunaan metode observasi dan wawancara sebagai tambahan dalam mengumpulkan data. Hal ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang penerapan ABK dan dampaknya terhadap kinerja Kementerian/Lembaga.
2. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Kementerian/Lembaga dalam penerapan ABK, peneliti diharapkan menambahkan beberapa variabel

- independen lainnya yang tidak tercakup dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan demikian, dapat diketahui variabel-variabel lain yang berperan penting dalam meningkatkan kinerja Kementerian/Lembaga.
3. Diharapkan untuk memperbaiki sistem pelatihan yang diberikan kepada pegawai agar semua lapisan dapat memahami dan menyadari pentingnya penerapan ABK. Dengan pelatihan yang memadai, pegawai akan lebih mampu mengimplementasikan ABK dengan efektif
 4. Agar meningkatkan transparansi, diperlukan peningkatan sistem pemberian informasi kepada publik dan laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu. Dengan transparansi yang lebih baik, masyarakat dapat lebih memahami dan memantau bagaimana anggaran digunakan oleh kementerian dan lembaga..

Berikut adalah rekomendasi untuk penelitian lanjutan yang berfokus pada seberapa efektif penerapan ABK dibandingkan dengan kinerja Kementerian atau Lembaga. Diharapkan bahwa rekomendasi ini akan membantu mengembangkan teori dan praktik penerapan ABK serta meningkatkan kinerja dan efektivitas aparatur pemerintahan secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- [2] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
- [3] Dwi Suharnoko, 2019. Efektivitas Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Perangkat Daerah di Kabupaten Malang, *Jurnal Karta Raharja* 1(2) (2019); 1- 13;
- [4] Junery, M. Fadhil dan Norhanisah, 2019. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah; 1-9;
- [5] Fratiwi, U'ah Ganda. 2017. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur); 1-11;
- [6] Made, Anwar dan Wulandari, Retno. 2019. Analisis Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Malang. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* Volume 8, No 2; 1-11;
- [7] Dewi, Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi, & Wiguna, I Gd Nandra Hary. 2019. Evaluasi Penerapan Performance Based Budgeting pada Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi* Vol. 4, No. 2; 201-222;
- [8] Sofyani, Hafiez dan Prayudi, Made Aristia. 2018. Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Di Pemerintah Daerah Dengan Akuntabilitas Kinerja "A"; *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 13, No. 1; 1-11;
- [9] Akbar, Dendy Syaiful. 2018. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja. *Jawara* Vol. 6 No. 1; 1-9;
- [10] Fauzan, Fajri Akbar. 2021. Determinan Efektifitas Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dan Penyerapan Anggaran di Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu; 1-20;
- [11] Binawati, Enita. 2015. Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Dan Akuntabilitas Sektor Publik Studi pada Pemerintah DIY. *Wahana* Vol. 18. No. 1; 1-19;
- [12] Biswan, Ali Tafriji dan Grafitanti, Iklima Devi. 2021. Memaknai Kembali Penganggaran Berbasis Kinerja Berdasarkan Studi Implementasi Penganggaran Sektor Publik; 1-22;
- [13] Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- [14] Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi terbaru. Yogyakarta. Andi.
- [15] Mutia, Nila, 2009. *Usulan Rancangan Kinerja Perusahaan*. Universitas Indonesia.
- [16] Harun, 2009. *Reformasi Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia*. Salemba Empat.
- [17] Pranawukir, I., & Sukma, A. H. (2021). Strategi Corporate Social Responsibility Dompot Dhuafa dalam Membangun Brand Differentiation Lembaga. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP)*, 3(1), 22-32.
- [18] Kuncara, T., Mukodim, D., & Segoro, W. (2021). The Effect Of Health, Education, Capital, Technology, Inflation, And Gross Of Regional Domestic Products On Poverty Level In North Maluku Province. *International Journal of Science, Technology & Management*, 2(4), 1423-1427.